



Stara Asrita, SIKom MA
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

KESETARAAN gender adalah suatu dasar hak asasi manusia sama seperti kebutuhan menda-pat pekerjaan sebagai bagian dari keberlangsungan hidup. Meski begitu, perempuan masih mendapatkan perbedaan gaji

Perempuan dan Kesenjangan Mendapat Untung

dibandingkan laki-laki. Untuk per-tama kalinya, tanggal 18 September 2020 dirayakan seba-gai International Equal Pay Day. Perayaan ini diharapkan dapat mengangkat nilai perempuan dalam hal upah kerja. Kesenja-ngan upah antara perempuan dan laki-laki secara global diper-kiraan mencapai 23 persen. Se-lama ini perempuan seringkali mendapat diskriminasi dalam pekerjaan karena dianggap ku-rang kompeten sehingga hanya digaji sekedarnya bahkan di bawah standar upah minimal. Di semua wilayah, perempuan dibayar lebih rendah dibanding-kan laki-laki. Perempuan memiliki hak untuk mendapat kesetaraan upah karena mereka juga bekerja keras sama seperti laki-laki. Bahkan di beberapa industri, pe-rempuan lebih dibutuhkan dari-

pada laki-laki namun perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dalam pemberian gaji. Menurut United Nation, ada beberapa fakta tentang kesenja-ngan upah berdasarkan jenis kelamin. Pertama, perempuan mendapatkan 77 sen untuk se-tiap dolar yang diperoleh laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Perempuan mendapatkan keti-dakadilan meskipun mereka juga berada dalam level yang sama dengan laki-laki karena sistem patriarki yang masih terbangun hingga saat ini. Dalam berbagai bidang, laki-laki ingin mendapat-kan kekuasaan yang lebih dari perempuan. Perempuan juga sering tidak mendapatkan hak dalam pengambilan keputusan meskipun berada dalam strata yang sama dengan laki-laki ka-rena jarang mendapat kesempa-

tan untuk mengaktualisasikan diri di ruang publik. Fakta kedua, perempuan le-bih dominan untuk bekerja di sek-tor pekerjaan dengan gaji rendah namun memiliki resiko kerja yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya buruh perempuan yang jumlahnya lebih banyak bekerja sebagai petani, pember-sih kaca gedung, tenaga kerja wanita di luar negeri. Perempuan Ketika menjadi korban perkosaan atau penganiayaan misalnya, tidak mendapat bantuan hukum yang maksimal bahkan malah cenderung disalahkan. Fakta ketiga, dibutuhkan waktu 257 tahun untuk menutup jarak kesenjangan upah perem-puan dan laki-laki secara global. Hal ini membuktikan bahwa pe-nerimaan upah perempuan sa-

ngat sedikit dibanding laki-laki. Butuh waktu yang lama untuk mewujudkan keseimbangan gaji secara gender. Hal ini terjadi karena dominasi actor tertentu sebagai pembuat kebijakan. Fakta keempat, perempuan setidaknya melakukan 2,5 kali lebih banyak pekerjaan domestik dan melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa dibayar. Sedang-kan laki-laki tidak melakukan hal yang sama sehingga tidak ba-nyak energi yang keluar diban-ding perempuan yang memiliki beban kerja ganda. Padahal laki-laki sering mendapat tunjangan keluarga sedangkan perempuan tidak mendapatkan hak tersebut. Di Indonesia, terjadi juga ke-senjangan upah berdasarkan je-nis kelamin. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, per



Februari 2019, perempuan men-dapat gaji rata-rata 2,1 juta, sedangkan laki-laki 2,8 juta per bulan. Hal tersebut merupakan akibat dari sistem yang belum memadai kepentingan perem-puan.

Usaha untuk mendapatkan hak yang sama dalam sistem dan struktur akan terus dilakukan oleh perempuan di berbagai aspek. Sebagai perempuan sudah seharusnya diberikan kesempa-tan dan keadilan tanpa adanya diskriminasi yang merugikan. Ke-bebasan berpendapat adalah hak semua manusia, begitu pun perempuan juga berhak menyua-rakan pendapat kepada khalayak umum, melawan segregasi yang ada, salah satunya adalah mem-perjuangkan kesetaraan upah.***

Sinergi Sambungan hal 1 Ketua Sambungan hal 1

Padahal keduanya seharusnya saling menguatkan satu sama lain. Pergulatan hubungan antara pusat dan daerah memang sudah terjadi sejak lama di Indonesia dan belum menemukan titik terangnya hingga kini. Ketakkunjung berhasil menemukan titik-temu hu-bungan pusat dan daerah inilah yang menjadikan wajah Republik Indonesia seperti saat ini. Ada daerah yang menda-patkan jatah pembangunan cukup banyak, karena status daerah istimewa maupun daerah khusus. Pada sisi yang lain, mayoritas daerah mendapatkan kue pembangunan sangat kecil sehingga sulit mengembangkan daerahnya. Pemerintah pusat justru masih ada yang merasa situasi ini terjadi karena ke-salahan daerah. Padahal permasalahan itu bermuara pada satu sumber, kega-galan bersama menata hubungan pusat dan daerah. Sejak proklamasi sampai hari ini, penataan hubungan pusat dan daerah, baik yang diatur dalam konstitusi maupun UU organikny hanya menam-pakkan wajah politik mayoritas semata. Padahal sila kelima Pancasila, dengan tegas mengamatkan keEadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia! Gagasan untuk menyamakan visi pem-bangunan daerah dan visi nasional ini mi-

salnya, bisa kita lihat dari kacamata yang berbeda. Pertama, gagasan ini muncul dari pendapat DPR. Padahal aspek pengaturannya adalah terkait dengan hu-bungan pusat dan daerah, sehingga lebih tepat jika menjadi urusan DPD, bukan DPR. DPD memiliki kewenangan mengu-rusi kepentingan daerah, sedangkan DPR mengurus urusan yang berskala na-sional. Ini menandakan tidak bekerjanya mesin DPD sampai hari ini, padahal DPD adalah representasi daerah di pusat atau pemerintah nasional. Kedua, logika pembangunan yang saat ini digunakan adalah sinergi nasional. Logika ini bisa kita nilai tidak saja dari berbagai statemen pemerintah, namun kalau kita membaca lebih seksama risalah sidang UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sangat je-las terlihat bagaimana paradigma sinergi nasional ini dimasukkan. Pemerintahan yang memiliki semangat ekerja, kerja, kerja! akan sangat berorientasi pada pembangunan (terutama pembangunan fisik). Pembangunan menghendaki adanya suasana politik dan hukum yang tenang, aman, dan stabil. Karena itu, harus ada sinergi nasional antara peme-rintah pusat dengan pemerintah daerah, agar pembangunan dapat terwujud.

Secara substansial, sinergi nasional sesungguhnya tidak berbeda dengan sta-bilitas nasional yang dahulu diagung-agungkan pemerintah orde baru. Hanya saja cara-cara yang ditempuh berbeda. Namun, keduanya setidaknya sama-sama mengorbankan kepentingan da-erah dan masyarakat daerah demi sinergi nasional. Memang tidak ada yang salah dengan program pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan. Tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang tidak mela-kukan pembangunan, bahkan justru pembangunan itu sendiri adalah ukuran dari maju atau berkembangnya suatu ne-gara. Namun, pembangunan tidak harus mengorbankan otonomi dan desentral-isasi, terlebih mengorbankan masyarakat daerah. Otonomi dan desentralisasi pada prin-sipnya yang paling dasar adalah kebe-basan dan kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Kebebasan dan kemandirian ini dijamin oleh konstitusi. Sehingga logika apapun tidak dapat mereduksinya sepan-jang konstitusi itu belum berubah. (Penulis adalah peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)-d

merupakan pejabat yang pertama kali mengumumkan dirinya positif Covid-19 beberapa waktu lalu, kemudian sembuh. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dikabarkan juga positif Covid-19 namun belakangan hasil tes swabnya su-dah negatif. Edhy langsung menjalani pe-rawatan di RSPAD Gatot Subroto dan kabar terbaru sudah negatif, seba-gaimana disampaikan politisi Partai Gerindra Ahmad Suffmi Dasco. Mantan Duta Besar Amerika Serikat Dino Patti Djalal juga dinyatakan positif Covid-19. Pejabat lainnya yang pernah di-nyatakan positif Covid-19 Walikota Bogor

Bima Arya, Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana, Walikota Tanjungpinang Syah-rul, Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor hingga Sekda DKI Jakarta Saefullah yang meninggal dunia pada 16 September 2020. "Ini merupakan bentuk transparansi pu-blik dan tidak perlu terjadi stigma negatif kepada para pejabat publik," tambah Wi-ku. Sebab virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 tidak mengenal jabatan, jenis kelamin, usia dan tidak mengenal waktu. "Siapa pun bisa terkena dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia," katanya. (Ant/Ati)-d

Presiden Sambungan hal 1 Kemudian menyerukan pentingnya seluruh ne-gara terus memperkuat PBB dan multilateral-isme," kata Retno. Menurut Presiden Sidang Majelis Umum PBB 75, Volkan Bozkir, ini adalah cara PBB un-tuk menekan penyebaran virus Korona. "Jika saya mentransfer kepemimpinan saya ke kan-didat berikutnya di tahun depan, itu bisa saja menjadi pemakaman, bukan selebrasi. Maka, kami bilang tidak untuk para pemimpin yang ingin datang ke sini," katanya dalam pengarah-an pers, Rabu (16/9). Ditambahkan, Amerika Serikat member-

lakukan aturan karantina 14 hari untuk para pendatang, termasuk pemimpin yang ingin datang ke Sidang Majelis Umum PBB. "Ada beberapa pemimpin yang ingin datang lang-sung, tapi mereka tidak akan bisa berpidato jika tidak datang 14 hari sebelumnya," beber diplo-mat Turki itu. Selain Presiden Jokowi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati juga akan menyampaikan pidato dalam acara ini secara virtual. (R-1)-f

"WISUDA XCI PERWIRA TRANSPORTASI LAUT PROGRAM DIPLOMA IV DAN PROGRAM PEMBENTUKAN DIKLAT PELAUT TK III SERTA PENUTUPAN DIKLAT KOMPETENSI PELAUT TK I, II & III SESUAI STCW 2010"

NO	NAMA	NIT
JURUSAN NAUTIKA		
1	ADAM IHZA MAHENDRA	541712106516 N
2	ADHI RAHMAT ROMADHON	541712106518 N
3	ADITYA AMAR MAHENDRA	541712106519 N
4	AHAMED DAUD IBRAHIM	541712106522 N
5	ANANDA BARA NURDIANSYAH	541712106525 N
6	ANDIKA MAHENDRA BERLIANTO	541712106526 N
7	ANDRIANSYAH	541712106527 N
8	APRIALDO ADHI SAPUTRO	541712106529 N
9	BACHTIAR BURHANI	541712106530 N
10	DANANG ADI SUWITO	541712106532 N
11	DEDI RIYANTO	541712106533 N
12	DEWANGGA RAGIL PUTRA	541712106535 N
13	DIMAS ESA FIRDAUSI KUSUMA	541712106537 N
14	DIMAS HUSNI ABADI	541712106538 N
15	DIMAS RAMADHAN PUTRA	541712106539 N
16	DONNA ALFARY	541712106540 N
17	DWI RIYANTO	541712106541 N
18	ELGA CANDRA UTOMO	541712106542 N
19	FAHAD SUGIARTO	541712106544 N
20	FAIZAL ADAM NUGROHO	541712106545 N
21	FUAD JAVIER HAFIZ	541712106547 N
22	GALIH ADI JADMIKO	541712106549 N
23	GALIH SAPUTRO	541712106551 N
24	GUSTOM TRIARDHIAT	541712106552 N
25	HARIS SUPRIYANTO	541712106553 N
26	HASAN BAHRUL ILMI	541712106554 N
27	IBRAHIM LUTHFI ASSIDDHIQ	541712106555 N
28	ILHAM DWI PUTRA RAMADHAN	541712106557 N
29	ILHAM HANIF RAMADHAN	541712106558 N
30	IRWAN SETIABUDI	541712106559 N
31	ISTAT ANGGORO DWI SANDI EFENDI	541712106560 N
32	MARGO BASKORO	541712106567 N
33	MUHAMMAD DAROJAT AFFAN FAJARI	541712106565 N
34	M.JALU NUGROHO	541712106566 N
35	MOH. FAHRIZAL	541712106568 N
36	MUHAMAD IHSAN	541712106569 N
37	NUR ALAM SALEH	541712106572 N
38	NURULLAH ALI RAMADHAN	541712106573 N
39	PANJI RINALDI	541712106574 N
40	PRADIKSA NAROTAMA ABIDAR	541712106575 N
41	RAIHAN AKBAR	541712106578 N
42	REFO FALAH DEWANTARA	541712106580 N
43	REZKI BAHAR PURNOMO	541712106582 N
44	RIFO RAIS ANANDA	541712106583 N
45	RIZAL LATIF KRESNAYUDA	541712106584 N
46	RIZKI AGUNG NUGROHO	541712106585 N
47	RIZKY AWALUDIN FEBRISISWANTO	541712106586 N
48	ROY MIKAEL SIMARMATA	541712106589 N

NO	NAMA	NIT
49	TIMOTIUS RAYNALDO VICKY BENGE	541712106594 N
50	TULUS WIRA BHAKTI	541712106595 N
51	WAHID NUR HIDAYAT	541712106596 N
52	WAHYU RAHMAWAN	541712106597 N
53	WIBISONO WIDI PANGESTU	541712106598 N
54	YOFAN APRELIAN MUHYI ISQUANDI	541712106600 N
55	YOGA ARDIYANTO	541712106601 N
56	YUSUF DAROAINI	541712106602 N
JURUSAN TEKNIKA		
1	ACHMAD RIFKI AFANDI	541712206605 T
2	ACHMAD SHOFI ALFANI	541712206606 T
3	ADNANDA GIAR SYAHPUTRA	541712206607 T
4	ADY SENNO PRASETYO	541712206608 T
5	ANDRE MEGA SAPUTRA	541712206611 T
6	ANGGA RINDUWANSAN	541712206613 T
7	ARFIAN YULI PRASETYA	541712206615 T
8	BARKAAJI KUSUMA	541712206616 T
9	BAYU SETIYONO	541712206617 T
10	DENIS IRAWAN	541712206620 T
11	DIMAS YUNianto	541712206621 T
12	DWI IMAM SURYADIANSYAH	541712206623 T
13	FARRELL AGATHON HARYANTO	541712206625 T
14	FEBRI DWI UTOMO	541712206626 T
15	HAFIDH DAFA ISLAMIA PUDYA	541712206631 T
16	HAICHAL FIRDAUS	541712206632 T
17	HELDYAN ILHAM RAMADHANI JADMIKO	541712206633 T
18	HENDRO KURNIAWAN	541712206634 T
19	HILAL KURNIAWAN	541712206635 T
20	IRFAN WIRAWAN	541712206638 T
21	JATI KHATULISTIWA	541712206639 T
22	MAHATVA SURYAWIJAYA	541712206641 T
23	MUCHAMMAD SHEHATUL FURQON	541712206642 T
24	MUHAMAD KHOERUL ANAM	541712206643 T
25	MUHAMMAD ARIEF WIDHI PRANOTO	541712206644 T
26	MUHAMMAD ELHAKIM FIRMANA	541712206646 T
27	MUHAMMAD FIKRI ARDIAN	541712206648 T
28	MUHAMMAD SANDRA ZUSRON FAHRUDIN	541712206650 T
29	NIYAN DANEAL SAPUTRA	541712206652 T
30	NOVENDA PUTRA Irdianto	541712206653 T
31	RAGHDAN GALIH PERDANA	541712206655 T
32	RIZKY ADI SETIAWAN	541712206657 T
33	SATRIYO AJI	541712206658 T
34	VINSENSIUS YOGA ADIWIYANA	541712206661 T
35	WIDYA ANGGA PERMANA	541712206662 T
36	YOGIK WISNU WIDAYANTO	541712206663 T
37	YOSUA OKTAVIANUS PURWANTO	541712206664 T
38	ZAID KHOZALI	541712206665 T